

Presiden Minta Kepala Daerah Cek Langsung Prokes Belajar Tatap Muka

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo meminta para kepala daerah untuk memeriksa langsung ke lapangan penerapan protokol kesehatan (prokes) saat pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah agar tidak terjadi penularan kasus COVID-19.

"Kontrol lapangan harus terus dilakukan utamanya sekarang berkaitan dengan sekolah PTM. Dicek betul kesiapan sekolah dalam melakukan prokes," kata Presiden dalam pembukaan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Otonomi Expo 2021 di Istana Kepresidenan Bogor, Rabu (20/10), yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan

Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di sekolah, terutama jenjang sekolah dasar, kata Presiden, bukanlah pekerjaan mudah. Presiden Jokowi mendengar sudah ada pelajar yang terpapar COVID-19. Maka itu, ia meminta kewaspadaan tinggi seluruh pihak untuk memastikan protokol kesehatan pencegahan COVID-

19 di sekolah berjalan baik. "Protokol kesehatan betul-betul dijalankan karena mengelola anak-anak yang SD ini tidak mudah, 1-2 (pelajar) sudah mulai terpapar lagi," kata Presiden.

Ia mengingatkan jangan sampai Indonesia seperti negara-negara lain yang mengalami peningkatan kasus COVID-19 setelah pelonggaran pembatasan kegiatan sosial dilakukan.

"Saya minta semua daerah, juga saya minta kewaspadaannya tinggi karena beberapa negara merangkak naik karena pembukaan sekolah dan kita tidak mau itu terjadi di negara kita," ujarnya.

Presiden Jokowi juga meminta pemerintah daerah untuk selalu memeriksa ketersediaan obat, kesiapan rumah sakit, karena kondisi pandemi COVID-19 di global saat ini masih tidak pasti. Pemerintah daerah harus selalu siaga untuk mengantisipasi terjadinya penularan kasus COVID-19 di tengah bergulirnya kembali kegiatan ekonomi seperti perdagangan, pariwisata dan investasi. Meskipun kegiatan ekonomi telah dibuka, Presiden mengingatkan aspek kesehatan tetap menjadi nomor satu.

"Sekali lagi kita harus mulai mengaktifkan ekonomi kita dan selalu siaga menghadapi semua hal yang tidak pasti karena dunia global sekarang ini penuh keragu-raguan, penuh ketidakpastian, penuh dengan kompleksitas masalah yang sebelumnya tidak pernah terjadi," kata Presiden Jokowi. (ANTARA)



Presiden Joko Widodo memberikan sambutan pada pembukaan Otonomi Expo 2021 oleh Apkasi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.



DIY Berharap PPKM Level 2 Jadi Angin Segar Sektor Pariwisata

YOGYAKARTA - Kepala Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta Singgih Raharjo berharap penurunan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dari level 3 ke level 2 menjadi angin segar sektor pariwisata di daerahnya.

"Saya berharap bisa memberi angin segar bagi wisatawan," kata Singgih saat dihubungi di Yogyakarta kemarin.

Ia meyakini penurunan level PPKM tersebut mampu menggairahkan sektor wisata karena anak usia di bawah 12 tahun sudah diperbolehkan memasuki objek wisata meski harus dalam pengawasan orang tua. "Anak usia di bawah 12 tahun sudah boleh (masuk) dengan pengawasan orang tuanya yang lolos skrining PeduliLindungi," ujar Singgih.

Menurut dia, pelarangan anak usia di bawah 12 tahun memasuki destinasi wisata cukup menghambat laju kunjungan wisata di DIY. Pasalnya, segmen wisata di daerah ini adalah wisata keluarga yang rata-rata mengikutsertakan anak-anak.

Berdasarkan catatan Dispar DIY, total kunjungan wisata dari tujuh destinasi wisata yang menjalani uji coba beroperasi rata-rata berkisar 4.000 sampai 5.000 wisatawan saat akhir pekan dan 1.000 sampai 2.000

wisatawan saat hari biasa. "Karena kemarin belum boleh ya anak di bawah 12 tahun, padahal wisata kita kan wisata keluarga. Jadi terkendala di situ," jelas dia.

Selain memperbolehkan anak di bawah usia 12 tahun, lanjut Singgih, jumlah objek wisata yang akan diperbolehkan melakukan uji coba beroperasi juga semakin banyak. Asalkan QR terdapat kode QR PeduliLindungi dari Kementerian Kesehatan, menurut dia, destinasi wisata boleh melakukan uji coba buka.

Ia menambahkan syarat lain yang harus dipenuhi destinasi wisata adalah telah mengantongi sertifikasi Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability (CHSE), dan menggunakan aplikasi Visiting Jogja sebagai sistem reservasi.

Hingga kini, Dispar DIY masih melakukan pendataan destinasi wisata mana saja yang telah mendapatkan kode QR tersebut mengingat pengajuan dilakukan masing-masing pengelola secara mandiri. "Ada banyak (sudah mendapatkan kode QR), angka pastinya saya belum dapat. Tapi ada kalau di atas 30 (destinasi wisata)," kata Singgih.

Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 53 Tahun 2021 tentang PPKM Level 3, Level 2, Level 1 Covid-19 se Jawa-Bali, menyatakan status PPKM di DIY kini pada level 2. Kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah DIY mulai Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, serta Kota Yogyakarta. (ANTARA)



Salah satu tempat rekreasi/objek wisata di DIY di Kabupaten Bantul.

Pemerintah Terus Dorong 3T untuk Kendalikan Pandemi COVID-19

JAKARTA - Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemerintah terus mendorong pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) di setiap daerah guna semakin mengendalikan pandemi COVID-19.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) itu menjelaskan bahwa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tetap akan digunakan sebagai strategi untuk mendorong pemerintah daerah tetap berpegang teguh pada 3T.

"PPKM itu kan indikatornya adalah respons laju penularan dan respons kapasitas. Nah di respon laju penularan kan di situ ada testing tracing, berapa test, berapa jumlah tracing yang minimal harus mereka lakukan," ujar Nadia kepada ANTARA saat dihubungi, Rabu

(20/10).

"Ya otomatis itu memang harus memacu dan untuk daerah-daerah mempertahankan testing rate-nya maupun tracing rate-nya. Karena kalau enggak PPKM-nya (level) bisa turun," lanjut Nadia.

Sementara itu, Nadia mengatakan bahwa potensi terjadinya gelombang ketiga pada awal tahun 2022 sangat memungkinkan jika masyarakat mulai abai dengan protokol kesehatan, mengingat terdapat perayaan Natal dan tahun baru yang menyebabkan peningkatan mobilitas masyarakat secara bersamaan.

Menurut Nadia, peningkatan kasus COVID-19 adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Namun berbekal pelajaran dari gelombang 1 dan 2, diharapkan penanganannya bisa lebih baik. "Karena gelombang 3 itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi, pe-

ingkatan kasus bisa terjadi tapi kita tidak berharap setinggi apa yang terjadi di bulan Juli, artinya dengan persiapan kita di hilir peningkatan kasus itu masih bisa kita tangani dengan baik," kata Nadia.

"Tentunya kita berharap kalau pun terjadi peningkatan kasus, kita terus berusaha untuk membatasi mobilitas, kalau memang tingkat mobilitas sudah sangat tinggi pada level yang nanti akan menyebabkan virus itu akan cepat sekali tersebar di dalam masyarakat, itu yang tentunya akan diupayakan," lanjutnya.

Nadia juga kembali mengingatkan masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, sebab pandemi COVID-19 belum berakhir. Dia pun berharap masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan lantaran tren kasus COVID-19 terus mengalami penurunan. (ANTARA)

Pemkab Gunung Kidul Secara Resmi Uji Coba Terbatas 27 Objek Wisata

GUNUNG KIDUL - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), secara resmi melakukan uji coba terbatas 27 objek wisata yang sudah memiliki sertifikat Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability atau CHSE dengan kapasitas maksimal 25 persen.

Sekretaris Dinas Pariwisata Gunung Kidul Harry Sukmono di Gunung Kidul, Rabu (20/10), mengatakan uji coba terbatas pembukaan 27 objek wisata ini mengacu pada Surat Edaran (SE) Nomor: 556/4825 tentang Pembukaan Destinasi Wisata di Kabupaten Gunung Kidul yang ditanda tangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Gunung Kidul Drajad Ruswandono.



Pantai Ngandong di Kabupaten Gunung Kidul.

"Pembukaan objek wisata ini berlaku sejak hari ini sesuai dengan surat edaran yang ditanda tangani Sekda Gunung Kidul Drajad Ruswandono pada Selasa (19/10)," kata Harry.

Ia mengatakan pembukaan objek wisata secara terbatas juga sesuai dengan Instruksi Bupati Gunung Kidul Nomor 443/4749 Ten-

tang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Gunung Kidul, bahwa tempat wisata telah diizinkan buka dengan ketentuan.

Adapun objek wisata yang telah dibuka secara terbatas, meliputi kawasan pantai, wisata alam pegunungan, wisata alam. Wisata pantai

yang dibuka, yakni Kawasan Baron-Seruni, Kawasan Pantai Wediombo, Kawasan Pantai Siung, Kawasan Pantai Ngrenehan, Kawasan Pantai Ngedan, Kawasan Pantai Gesing, dan Kawasan Pantai Timang.

Kemudian wisata alam dan pegunungan, yakni Gunung Gentong, Gua Cerme, Gunung Gambar, Taman Batu Mulo, Kawasan Gunung Api Purna Nglanggeran, Kawasan Gua Pindul, Luweng Sampang, Bejiharjo Edupark, Watugupit, Sri Gethuk Bleberan, Hutan Wanasadi, Green Village Gedangsari, Embung Sriten.

Selanjutnya, Kalisuci Cave Tubing, Telaga Jonge, Cempluk Kesamben, Taman Wisata Embung Bembem, Gunung Ireng, Dam Beton, dan Teras Kaca. (ANTARA)

ANTARA NEWS



109 JUTA ORANG SUDAH VAKSIN COVID-19 DOSIS I

Lebih dari 109 juta orang telah mendapat vaksin COVID-19, atau sudah separuh dari target nasional sekitar 208 juta orang. Pemerintah berupaya mengejar target vaksinasi COVID-19 dengan menyoar masyarakat di wilayah-wilayah yang sulit diakses.

KELOMPOK PENERIMA VAKSIN



TOTAL VAKSINASI



UPAYA MEMPERCEPAT VAKSINASI

- Memperbanyak pos vaksinasi di desa-desa yang dikoordinir oleh Puskesmas.
- Bekerja sama dengan BKKBN untuk menggunakan pendekatan keluarga.
- Menjangkau masyarakat di daerah terpencil melalui kerja sama antar kementerian.
- Mendistribusikan stok vaksin ke daerah yang sulit terjangkau melalui jalur darat.

Arahan bapak presiden, supaya dipercepat (vaksinasi), terutama ibu kota-ibu kota provinsi yang masih rendah dan beberapa kota-kota yang padat penduduknya."

Budi Gunadi Sadikin - Menteri Kesehatan

Dinkes Jateng Minta Pemda Perbanyak Sentra Vaksinasi

SEMARANG - Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah meminta pemerintah kabupaten/kota memperbanyak sentra vaksinasi guna meningkatkan capaian vaksinasi COVID-19 yang masih rendah di beberapa daerah.

"Pemerintah daerah jangan hanya mengandalkan sentra vaksinasi yang terpusat di pendapa kabupaten/kota saja, tapi menyebar di sejumlah tempat," kata Kepala Dinkes Provinsi Jateng Yulianto Prabowo di Semarang, kemarin.

Permintaan tersebut dikhususkan untuk kabupaten/kota seluruh Jateng

yang cakupan vaksinasinya belum mencapai 50 persen. Menurut dia, percepatan vaksinasi juga bisa dilakukan dengan menambah tenaga vaksinasi hingga ke tingkat desa/kelurahan. "Termasuk, melakukan vaksinasi ke rumah-rumah warga yang diketahui belum divaksinasi," ujarnya.

Percepatan vaksinasi dengan cara dari rumah ke rumah juga diharapkan menyoar pada prioritas, yakni lansia, dan orang dengan penyakit bawaan atau komorbid.

"Untuk percepatan itu, tidak mengandalkan sentra-sentra vaksinasi,

tetapi perlu tim-tim vaksinasi di tingkat desa. Jadi, nanti serentak dan akan dipercepat. Karena kalau cuma sentra vaksinasi paling satu dua sentra saja, tapi kalau ada tim vaksinasi desa yang bergerak bersama akan mempercepat cakupan sasaran," katanya.

Yulianto mengungkapkan, hingga saat ini capaian vaksinasi di Jateng rata-rata sudah berada di angka 49,5 persen, namun masih ada daerah yang capaian vaksinasinya berada di bawah 50 persen hingga di bawah 30 persen. (ANTARA)